

## DIGITAL TRANSFORMATION IN LOCAL GOVERNMENT: ENHANCING FINANCIAL TRANSPARENCY THROUGH THE REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (SIKD)

M. Rizki Maulidi<sup>1</sup>, Zia Saafira<sup>2</sup>, Jihaan Nabila<sup>3</sup>, Mariana Mariana<sup>4</sup>, Rahmati<sup>5</sup>

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.

email. [rizkimaulidin2828@gmail.com](mailto:rizkimaulidin2828@gmail.com)<sup>1</sup>, [ziasafira7@gmail.com](mailto:ziasafira7@gmail.com)<sup>2</sup>,

[jihannabilaa71@gmail.com](mailto:jihannabilaa71@gmail.com)<sup>3</sup>, [mariana@pnl.ac.id](mailto:mariana@pnl.ac.id)<sup>4</sup>, [abrahmati68@gmail.com](mailto:abrahmati68@gmail.com)<sup>5</sup>.

Received Date: 31 Desember 2024

Revised Date: 17 Januari 2025

Accepted Date: 25 Januari 2025

*Keywords:*

*Regional Financial Information System*

*Transparency*

*Accountability*

*Digital Era*

*Regional Finance.*

*Kata Kunci:*

*Sistem Informasi Keuangan Daerah*

*Transparansi*

*Akuntabilitas*

*Era Digital*

*Keuangan Daerah.*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the Regional Financial Information System (Sistem Informasi Keuangan Daerah, SIKD) in enhancing financial transparency in local governments during the digital era. Additionally, it explores the impact of digital advancements on accountability and financial reporting, including their effects on efficiency and report quality. The study also identifies various challenges faced by local governments in achieving financial transparency and provides strategic recommendations to address these obstacles. The research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from scientific journals, research reports, and relevant articles discussing the role of information technology in enhancing transparency, the challenges of its implementation, and strategies for optimization. The data were categorized into three main themes: the contribution of information technology to transparency, barriers to its adoption, and strategic steps for optimization. The findings indicate that the implementation of SIKD, as mandated by Government Regulation No. 56 of 2005, significantly supports transparency and accountability in local financial management by facilitating structured and systematic documentation, management, and reporting of financial data. Digital transformation positively impacts efficiency, accuracy, and the openness of local financial information. However, several challenges persist, such as resistance to transparency, a lack of technological expertise, and limited infrastructure. To overcome these obstacles, collaboration between governments and communities, improving human resource competencies, and developing technological infrastructure are strategic steps to ensure better transparency.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di era digital. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pengaruh perkembangan era digital terhadap akuntabilitas dan pelaporan keuangan daerah, termasuk dampaknya terhadap efisiensi dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini mengidentifikasi

berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel relevan yang membahas kontribusi teknologi informasi terhadap transparansi, hambatan implementasinya, serta strategi optimalisasi penggunaannya. Kajian ini mengelompokkan data ke dalam tiga tema utama: peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, tantangan penerapannya, dan langkah strategis untuk optimalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIKD berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan mempermudah dokumentasi, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan. Transformasi digital berdampak positif terhadap efisiensi, akurasi, dan keterbukaan informasi keuangan daerah. Namun, sejumlah tantangan masih menghambat implementasi, seperti resistensi terhadap keterbukaan, minimnya tenaga ahli teknologi, serta keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan infrastruktur teknologi menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi digital saat ini telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor keuangan pemerintah. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sistem berbasis digital memungkinkan akses publik yang lebih luas terhadap informasi keuangan, sehingga mendukung integrasi dan transparansi anggaran pemerintah (Sahur & Amiruddin, 2023; Zulmasyhur et al., 2024). Selain itu, pelacakan data secara real-time memperkuat pengawasan internal dan eksternal, meminimalkan risiko kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Darusalam et al., 2023; Nnenna et al., 2024).

Di era digital ini, konsep *Good Governance* menjadi semakin relevan, khususnya dalam konteks otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai bidang, termasuk pengelolaan fiskal, sebagai bagian dari reformasi yang bertujuan meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Adamopoulos, 2023; Zámek & Zakharkina, 2024). Reformasi manajemen keuangan publik dalam kerangka New Public Management menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Transparansi dipandang sebagai elemen kunci dalam mekanisme akuntabilitas administrasi publik. Hal ini tidak hanya memperdalam

pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi praktik korupsi, dan mendorong pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan hasil yang dicapai (Ferreira et al., 2022; Indama, 2022; Priyambodo et al., 2023).

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Peningkatan transparansi mempermudah akses masyarakat terhadap informasi relevan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Internet Financial Reporting (IFR) memungkinkan laporan keuangan diakses secara daring, sehingga meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Albahrudin et al., 2023; Bahari et al., 2020). Namun, meskipun Kementerian Dalam Negeri secara berkala mengevaluasi dan memberi peringkat transparansi website pemerintah daerah, banyak daerah masih memiliki tingkat transparansi keuangan yang rendah (Porumbescu, 2017). Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk mendorong pemerintah daerah lebih berkomitmen dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangannya.

Secara keseluruhan, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah memberikan berbagai manfaat, termasuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik, serta peningkatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi digital guna mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan mendukung tercapainya Good Governance di era digital ini (Failany & Fahriani, 2024; Ferreira et al., 2022; He et al., 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh perkembangan era digital terhadap akuntabilitas dan pelaporan keuangan daerah, termasuk dampaknya terhadap efisiensi dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi keuangan di era digital, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi kendala tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah di era digital (Mariana, 2019, 2024; Mariana et al., 2024; Mariana & Amri, 2021; Nufiar et al., 2022). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel relevan yang membahas topik ini (Hendra et al., 2024; Mariana, 2024; Nufiar et al., 2020; Rahmatullah et al.,

2023; Wahyudi & Mariana, 2024; Zhul et al., 2024). Data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam tiga tema utama: kontribusi teknologi informasi terhadap transparansi, hambatan penerapan teknologi, dan strategi optimalisasi penggunaannya.

Teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. SIMDA mempermudah strukturisasi data dan akses publik terhadap laporan keuangan, sehingga meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran (Helmi Prila Aldino 1, 2023; Liza & Mariana, 2023; Muharik et al., 2023; Ramadana et al., 2023). Namun, berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman pegawai pemerintah tentang teknologi dan keterbatasan infrastruktur, masih menjadi tantangan (Sari et al., 2020; Widhiastuti & Sagung Oka Pradnyawati, 2023).

Untuk mengoptimalkan peran teknologi informasi, langkah-langkah strategis diperlukan. Pertama, pelatihan pegawai pemerintah untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi. Kedua, penerapan sistem transaksi non-tunai untuk meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, pengembangan platform digital yang memungkinkan akses real-time publik terhadap laporan keuangan daerah (Fajri et al., 2023; Haryono, 2020; Intisari, 2020; Mariana, 2023; Mariana & Ibrahim, 2022). Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Konsep Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Transparansi merupakan konsep luas yang berkaitan dengan tersedianya informasi (Supply Side Of Transparency), yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya (Demand Side Of Transparency). Konsep ini berlandaskan pada aksesibilitas informasi organisasi publik. Transparansi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efektifitas kebijakan, administrasi, dan manajemen (Ritonga & Syahrir, 2016).

Keterbukaan informasi menjadi pendorong pemerintah daerah untuk menyediakan akses yang lebih mudah terhadap laporan kinerja, baik terkait kerja maupun keuangan dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Transparansi dapat didefinisikan sebagai konsep yang mencakup penyediaan informasi, kemudahan akses, serta penggunaan oleh publik secara luas (Sandhi & Rahmanda, 2021). Transparansi keuangan diartikan sebagai upaya menghadirkan informasi keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan. Implementasi transparansi keuangan oleh

pemerintah daerah merupakan bagian penting dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (Sandhi & Rahmanda, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

### **Era Digital dan Transformasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah**

Di era ini, teknologi digital memainkan peran dalam mentransformasi paradigma pelaporan keuangan yang berkelanjutan. Dengan perkembangan pesat teknologi informasi, pemerintah tidak hanya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang baru tetapi juga menghadapi tantangan yang berpotensi mengubah pendekatan terhadap pelaporan keuangan berkelanjutan. Teknologi digital tidak hanya menawarkan platform yang lebih efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait keberlanjutan, tetapi juga menciptakan peluang inovasi dalam pengembangan metode pelaporan yang lebih menyeluruh. Esensi digitalisasi terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan proses kerja dan meningkatkan keahlian teknis, sehingga mendorong transparansi yang lebih tinggi. Dengan penerapan teknologi terkini seperti big data, kecerdasan buatan, dan blockchain, pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan (Anjarwati et al., 2024).

Berdasarkan pandangan World Economic Forum (WEF), transformasi digital merupakan integrasi teknologi digital di berbagai aspek organisasi, menghasilkan perubahan mendasar dalam operasional pemerintah dan memberi nilai tambah kepada masyarakat. Transformasi ini mencakup perubahan dalam proses pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan berbasis digital, hingga penerapan sistem berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Teknologi- teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analisis data, Internet of Things (IoT) cloud computing, dan blockchain yang memiliki peran besar dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adaptif dan responsif (Nisaa et al., 2024).

### **Peran Teknologi Informasi dalam Transparansi Keuangan Daerah**

Menurut (Gunawan, 2016), E-Government merupakan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi. Sistem ini dimanfaatkan sebagai media interaktif antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar lembaga pemerintahan. Pelaksanaan E-Government oleh pemerintah diawali dari layanan sederhana, seperti penyediaan informasi dan data berbasis komputer yang terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari perspektif pemerintahan, E-Government dapat digunakan sebagai alat komunikasi, baik secara internal di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dengan masyarakat. Selain itu, penerapan E-Government juga memberikan inovasi dalam sistem keuangan, seperti E-Budgeting yang mempermudah pengelolaan keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan. Afifah et al. (2021), menyatakan bahwa teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengolahan data keuangan.

Pemamfaatan teknologi informasi di era digital menawarkan peluang besar dalam mempercepat dan mempermudah pengolahan data keuangan di tingkat daerah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas, akurasi, dan transparansi laporan keuangan. Sistem teknologi informasi memungkinkan data transaksi dan laporan keuangan disusun secara lebih efisien sehingga masyarakat maupun pihak berwenang dapat memantau penggunaan anggaran secara transparan (Afifah et al., 2021).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam Meningkatkan Transparansi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 56 tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mengadministrasikan data keuangan daerah serta data terkait lainnya. Sistem ini menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, serta penanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 15). Dalam pengertiannya, SIKD mencakup serangkaian aktifitas yang melibatkan sumber daya manusia, prosedur, serta infrastruktur sistem informasi. Kepala daerah bertanggungjawab atas pengelola dan pengawasan data data keuangan yang diolah melalui mekanisme yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan akhir berupa penyajian informasi publik yang transparan. Proses pengolahan data ini di dasarkan pada prosedur yang berlaku, sehingga tahapnya menjadi bagian integral dari sistem SIKD itu sendiri. Tahapan perencanaan pemerintah daerah dituangkan melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), yang disusun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah mendapat persetujuan menjadi APBD, dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah, yang kemudian harus di pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemeritah daerah wajib menerapkan SIKD sebagaimana di atur dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 dan Peraturan Meteri Keuangan No 46 Tahun 2006 sebagai panduan teknis (Syairozi et al., 2021).

Dalam konteks transparansi keuangan daerah, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas SIKD yang mencakup aspek hardware dan software, memainkan peran penting. Semakin tinggi kualitas sistem baik dari sisi proses maupun output yang dihasilkan, pengguna cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan sistem secara berulah. Hal ini berdampak pada peningkatan intensitas penggunaan sistem oleh pemangku kepentingan. Penggunaan ulang sistem dapat diartikan sebagai indikator bahwa implementasi SIKD memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna. Transparansi yang lebih tinggi tercapai melalui peningkatan kualitas data yang tersedia, kemudahan akses informasi, dan kepercayaan terhadap proses pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh dari penerapan SIKD akan mendorong pengguna untuk memaksimalkan pemakaian sistem dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi publik (Mulyono & Malang, n.d.).

### **Pengaruh Era Digital Terhadap Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan daerah. Dengan berkembangnya teknologi informasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan mereka melalui penerapan sistem berbasis digital. Peraturan pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menjadi salah satu landasan utama dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah. Sistem berbasis digital memungkinkan pemerintah daerah mengelola data keuangan dengan lebih terstruktur, cepat, dan transparan (Syairozi et al., 2021).

Hesti (2016), menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital memiliki dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan adanya sistem digital, pemerintah daerah dapat menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Era digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan teknologi yang terus berkembang, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin transparan dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat untuk pengelolaan dana publik yang lebih baik.

### **Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Transparansi di Era Digital**

Di era digital, mewujudkan transparansi masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Banyak pihak tidak senang berbagi informasi secara terbuka, dan beberapa bahkan memanfaatkan situasi untuk memperumit akses demi kepentingan pribadi. Selain itu, kurangnya budaya dokumentasi yang sistematis

turut menjadi hambatan sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti. Hambatan lainnya yang terjadi yaitu minimnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang tersedia pada sektor publik meskipun fasilitas teknologi digital mulai berkembang, tingginya biaya membuat akses menjadi sulit bagi sebagian masyarakat, lokasi dan jumlah titik akses informasi di daerah terpencil sangat minim. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan titik akses yang terjangkau dan inklusif sehingga mewujudkan transparansi di era digital (Ridwan & Nurhakim, 2014).

Namun demikian, pemerintah sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mengelola keuangan secara transparan tanpa didukung teknologi yang memadai. Hambatan ini meliputi proses administrasi yang rumit, kesulitan dalam menelusuri alur data secara manual, hingga keterbatasan dalam penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, sistem manual juga rentan terhadap kesalahan manusia dan potensi penyalagunaan, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Failany & Fahrani, 2024).

## **KESIMPULAN**

1. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 dan peraturan terkait berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SIKD memungkinkan pemerintah daerah mengelola, mendokumentasikan, dan melaporkan data keuangan secara terstruktur dan sistematis, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
2. Transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem berbasis digital membantu pemerintah daerah menyajikan pelaporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga mampu membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik.
3. Meskipun era digital membawa peluang besar, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti resistensi terhadap keterbukaan informasi, minimnya tenaga ahli teknologi informasi di sektor publik, tingginya biaya implementasi teknologi, serta kurangnya infrastruktur di daerah terpencil. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan akses informasi yang inklusif demi mewujudkan transparansi yang lebih baik.

## **SARAN**

1. Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan berkala bagi pegawai di bidang keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengoperasikan sistem berbasis digital, seperti SIKD. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, harus menjadi prioritas untuk memastikan akses informasi yang merata.
2. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi blockchain, kecerdasan buatan (AI), atau big data analytics dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan.
3. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran melalui mekanisme partisipatif, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Selain itu, penyediaan portal daring yang ramah pengguna dan terjangkau dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah.

## **REFERENSI**

- Adamopoulos, I. P. (2023). Corruption and political interventions in public health authorities—Hellenic Republic Region of Attica: Conceptual analysis study. *European Journal of Environment and Public Health*, 7(3), em0139. <https://doi.org/10.29333/ejeph/13171>
- Afifah, S., Fadli, F., & Baihaqi, B. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Peran Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 8(2), 141–152. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i2.15203>
- Albahrudin, K. F., Putra, H. S., & Wardhaningrum, O. A. (2023). Analisis Transparansi Keuangan Daerah Melalui Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3945>
- Anjarwati, S., Kamil, I., Septiana, Yolifiandri, & Rana. (2024). Keberlanjutan Keuangan: Studi Tentang Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pelaporan Keuangan Berkelanjutan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 1163–1174.
- Bahari, A., Djunid, A., Putri, H., Vittra, A. P., & Dwiputri, A. T. (2020). Analysis of Local Government Web Transparency of South Eastasia Countries: a Case Study in Indonesia. *The International Conference on ASEAN 2019*, 36–47. <https://doi.org/10.1515/9783110678666-007>
- Darusalam, D., Janssen, M., Said, J., Sanusi, Z. M., & Omar, N. (2023). An

- Evaluation Framework for the Impact of Digitalization on the Quality of Governance: Evidence From Indonesia. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.332880>
- Failany, M. A., & Fahriani, D. (2024). *Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah*. 1(1), 1–6.
- Fajri, H., Taher, A., & Usman, N. (2023). The Influence of Teacher Competency, Motivation on Graduates' Performance and their Implications for Graduate Absorption in Aceh. *Migration Letters*, 20(S4), 111–122. <https://doi.org/10.47059/ml.v20i5.2930>
- Ferreira, L. C., Makiya, I. K., & Giocondo Cesar, F. (2022). *A Classification of Digital Platforms Applied to the Governance of Smart Cities*. December. <https://doi.org/10.20944/preprints202212.0227.v1>
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Haryono\*, O. A. J. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(2), 36–48. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.43768>
- He, G., Boas, I., Mol, A. P. J., & Lu, Y. (2017). E-participation for environmental sustainability in transitional urban China. *Sustainability Science*, 12(2), 187–202. <https://doi.org/10.1007/s11625-016-0403-3>
- Helmi Prila Aldino 1, R. S. 2. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Menara Ekonomi*, 4(2), 65–75. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i2.4025>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Hesti, M. M. (2016). Pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan Keuangan Daerah, dan sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah. In *Jurnal Akuntansi*.
- Indama, V. (2022). Digital Governance: Citizen Perceptions and Expectations of Online Public Services. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 1(2), 12–18. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.1.2.3>
- Intisari, F. (2020). *No ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA) SE-PAPUA BERBASIS LAMAN*. 4(June), 5.
- Liza, L., & Mariana, M. (2023). Can Budget Ratcheting Moderate the Relationship Between Financial Performance and Capital Expenditures? *Journal of Data*

- Acquisition and Processing*, 38(3), 5472–5485.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.777718>
- Mariana, M. (2019). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/61>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M. (2024). Arisan Online di Kota Sigli: Tinjauan dari Segi Hukum. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 61–70.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.232>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147.  
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Ibrahim, A. (2022). Determinan Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pendahuluan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 1–13. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/28>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33–40.  
<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>
- Muharik, R., Febrianto, A., Mogot, P. I., Bilqis, S. S., & Gultom, H. (2023). Peran Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Meningkatkan Pengolahan Data Keuangan Di Instansi Pemerintah. *JUTECH: Journal Education and Technology*, 4(2), 96–110.  
<https://doi.org/10.31932/jutech.v4i2.2988>
- Mulyono, I., & Malang, P. N. (n.d.). *Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Sikd ) Dalam Rangka Peningkatan Transparansi Dan*.
- Nisaa, R. K., Maulidya, S., Supriadi Bahrim, & Kustiwi, I. A. (2024). Teknologi Digital Dan Transformasi Internal Audit Terhadap Perlakuan Laporan Keuangan : Studi Literatur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), 263–277.  
<https://doi.org/10.55606/jumia.v2i2.2596>
- Nnenna, U. J., Perpetua, U. I., Nchaga, A. M., Hadijah, T., Mabonga, E., & Nyamboga, T. O. (2024). Impact of Digital Governance on Public Service Delivery in East Africa. *IAA Journal of Arts and Humanities*, 11(1), 18–29.  
<https://doi.org/10.59298/iaajah/2024/11.11829.11>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost

- Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Porumbescu, G. A. (2017). Does Transparency Improve Citizens' Perceptions of Government Performance? Evidence From Seoul, South Korea. *Administration and Society*, 49(3), 443–468. <https://doi.org/10.1177/0095399715593314>
- Priyambodo, K., Rizki, V., Sukma, N., & Paradisa. (2023). Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Situs Web. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 106–118. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.689>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniari, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(3), 403 – 422.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Sahur, A., & Amiruddin, A. (2023). Analysis of the Success of Implementing Digital Service Delivery in the Indonesian Public Sector: A Case Study on the Use of Online Public Service Applications. *International Journal Papier Public Review*, 4(3), 1–9. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v4i3.242>
- Sandhi, I. K., & Rahmanda, G. A. (2021). Tren Analisis Transparansi Laporan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Indah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 942–961.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskum, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 978–623.
- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). Mengadaikan Kembali Tanah Gadai. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i2.228>
- Widhiastuti, N. L. P., & Sagung Oka Pradnyawati. (2023). Teknologi Informasi Sebagai Pemoderasi Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 375–392. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i2.402>
- Zámek, D., & Zakharkina, L. (2024). Research Trends in the Impact of Digitization and Transparency on National Security: Bibliometric Analysis. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 8(1), 173–188.

[https://doi.org/10.61093/fmir.8\(1\).173-188.2024](https://doi.org/10.61093/fmir.8(1).173-188.2024)

Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>

Zulmasyhur, Z., Setiawan, H. D., & L. W., N. P. (2024). Enhancing Governance Through Digital Transformation. *Jurnal Governansi*, 10(1), 127–136.  
<https://doi.org/10.30997/jgs.v10i1.11544>